Koperasi Desa Merah Putih di Sulsel Masing-masing Dapat Anggaran Maksimal Rp3 Miliar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Ambang batas anggaran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di setiap desa di Sulawesi Selatan (Sulsel) capai Rp3 miliar. Hal itu diungkap oleh, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman, saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin (19/5/2025). Ia mengatakan, setiap desa diberikan plafon anggaran hingga Rp3 miliar untuk mendukung koperasi tersebut. “Bukan modal awal, tapi plafon Rp3 miliar satu (desa) bisa," katanya. Namun, kata Jufri, pencairan untuk anggaran tersebut bergantung pada berapa pengajuan setiap Kopdes ke pemerintah. 'Tapi, pencairannya bergantung pada proposal yang diajukan oleh desa dan itu akan dinilai oleh bank, berapa anggaran yang layak diberikan sesuai dengan proposal,” ungkapnya. Menurutnya, meski batas maksimal anggaran ditetapkan Rp3 miliar, nilai yang diajukan dan disetujui bisa jauh lebih kecil. “Yang banyak diajukan itu sekitar Rp300 juta. Tapi kalaupun ditetapkan angka tertingginya tiga miliar, bisa jadi yang cocok hanya Rp500 juta. Itu yang akan dinilai,” ujarnya. Adapun kata Jufri Rahman, dana tersebut bukan merupakan hibah, melainkan pinjaman yang wajib dikembalikan oleh koperasi yang bersangkutan. Anggaran ini merupakan hasil kerja sama antara kementerian dan pihak perusahaan, dengan mekanisme penyaluran melalui bank persepsi atau bank yang ditunjuk. Desa atau kelurahan yang membentuk koperasi diwajibkan mengajukan proposal kebutuhan, yang kemudian akan dinilai untuk menentukan besaran dana yang dapat dikucurkan. “Proposal tersebut dinilai, dan berapa yang layak diberikan sesuai dengan proposal itulah yang menjadi modal awal untuk digunakan oleh koperasi desa,” jelasnya.

11 Kabupaten di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih di bawah 50 persen dalam perampungan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Daerah-daerah itu adalah, Enrekang, Wajo, Bone, Bantaeng, Toraja Utara, Pangkep, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Kota Palopo, dan Makassar. Sementara itu, tujuh Kabupaten sudah dinyatakan merampungkan Kopdes Merah Putih. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman, mengatakan masih terdapat 17 daerah lainnya yang masih dalam proses pembentukan koperasi. Dari 17 daerah tersebut 11 di antaranya masih di bawah 50 persen. "Tinggal 17 yang sementara on proses. Dari 17 itu ada 11 yang capaiannya masih di bawah 50 persen," katanya saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar,Senin (19/5/2025).

Jufri mengaku, tiap koperasi bisa mendapatkan plafon pembiayaan hingga Rp 3 miliar. Namun, dana yang diberikan bukanlah dana hibah semata, melainkan pinjaman yang harus dikembalikan koperasi penerima. "(Rp 3 miliar) bukan modal awal, ada plafon. Tetapi, pencairannya itu bergantung pada proposal yang diajukan oleh desa/kelurahan dan itu akan dinilai bank berapa anggaran yang layak diberikan," ungkapnya. Lanjut Jufri, hingga saat ini, Kementerian Hukum telah menerbitkan akta pengesahan untuk 50 koperasi di 9 Kabupaten/Kota di Sulsel. Rinciannya, Bone telah mendapatkan pengesahan untuk tiga koperasi, Gowa dua, Jeneponto satu, Selayar 13, Maros 16, Pinrang tiga, Soppeng dua, Takalar delapan, dan Tana Toraja dua.